Kementerian PPN/ Bappenas

Australian Aid

Knowledge Sector Initiative

WORKING PAPER 7

Menggunakan Bukti untuk Merefleksikan 20 Tahun Demokrasi Afrika Selatan

Pandangan dari Dalam Ranah Kebijakan

Kementerian PPN/ Bappenas

Australian Aid

Knowledge Sector Initiative

WORKING PAPER 7

Menggunakan Bukti untuk Merefleksikan 20 Tahun Demokrasi Afrika Selatan

Pandangan dari Dalam Ranah Kebijakan

Oleh:
Harsha Dayal

Maret 2016

Menggunakan Bukti untuk Merefleksikan 20 Tahun Demokrasi Afrika Selatan

Pandangan dari Dalam Ranah Kebijakan

Pandangan penulis yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, atau Knowledge Sector Initiative. Semua entitas di atas tidak bertanggung jawab atas apa pun yang timbul akibat dari publikasi ini. Perspektif yang ditawarkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Departemen Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Republik Afrika Selatan. Penulis berterima kasih kepada Ian Goldman atas dukungannya dan kepada Stanley Ntakumba, Hermi Boraine, Gemma Wright, dan Fred Carden atas masukan dan ulasan akhirnya.

Pesan Kunci

- Pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dipengaruhi banyak hal, termasuk rekam jejak pada masa lalu.
- "Berpikir berorientasi bukti" *(evidence thinking)* penting untuk dipahami jika kebijakan berbasis-bukti hendak diterapkan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pertimbangan penting yang menentukan bagaimana suatu bukti dinilai, didapatkan, dan digunakan dalam ranah kebijakan adalah: Siapa yang mengajukan pertanyaan dan apa yang ditanyakan? Siapa yang memberikan bukti? Siapa yang menafsirkan dan menganalisis temuan?
- Untuk bergerak di ranah kebijakan diperlukan suatu pengawasan strategis. Hal ini mengingat kebijakan dipengaruhi oleh jejaring kompleks para aktor/ pemain di dalamnya. Ada keterpisahan antara mereka yang dipandang sebagai penghasil bukti (misal peneliti) dan mereka yang diharapkan menggunakan bukti (misal pembuat kebijakan). Mengatasi keterpisahan tersebut tidak hanya soal menjembatani kesenjangan melalui perantara yang mampu menerjemahkan penelitian dan bukti lain ke dalam kebijakan yang strategis dan relevan; lebih dari itu, hal ini berarti membangun hubungan yang efektif dan jejaring yang bersifat kolaboratif.
- Meski peneliti dan pembuat kebijakan bekerja dengan bukti, namun perlu diketahui bahwa bukti punya peran dan tujuan yang berbeda. Pembuat kebijakan bersentuhan dengan bukti dalam arti luas, meskipun dengan intensitas dan tujuan yang beragam derajatnya. Pertanyaan perihal kapasitas untuk memanfaatkan bukti di tingkat individu, organisasi, sistem, dan lembaga harus dijawab secara kolektif.
- Baik peneliti maupun pembuat kebijakan setuju bahwa bukti tidak dapat "berbicara sendiri". Saat suatu keputusan dibuat, semua hal yang memengaruhi kebijakan harus dipertimbangkan. Opini publik, kelayakan secara politis, dampak kebijakan, dan pengetahuan terhadap konteks lokal adalah bentuk-bentuk bukti yang sah bagi pembuat kebijakan.
- Penting untuk dipahami bahwa meningkatkan akses terhadap lebih banyak bukti tidak serta-merta menghasilkan pembuatan kebijakan yang lebih baik. Semakin banyak bukti yang dihasilkan berarti kapasitas administrasi dan prosedur perlu semakin dikuatkan agar mampu memanfaatkan besarnya volume data dan informasi yang masuk.

Daftar Isi

Pesan Kunci v
Daftar Isi vi
Singkatan dan Akronim vii
Ringkasan Eksekutif viii

1. Pendahuluan 1

2. Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti di Afrika Selatan 2
2.1. Pengaturan Kelembagaan 3
2.2. Memahami “Berpikir Berorientasi Bukti” 4
2.3. Pertanyaan Kepercayaan terhadap Data 6

3. Proses Kajian 20 Tahun – Studi Kasus 7
3.1. Bergerak di Ranah Kebijakan 8
3.2. Mengelola Kompleksitas untuk Meningkatkan Penggunaan Bukti 9
3.3. Tantangan Sistem Informasi dan Data 9
3.4. Mendapatkan Bukti Terbaik 11
3.5. Menghasilkan Pengetahuan Melalui Analisis dan Sintesis yang Efektif 11
3.6. Proses Perundingan dalam Bekerja dengan Bukti 11
3.7. Peran Pemerjuang Bukti 12
3.8. Memperbaiki Respons – Memahami Tuntutan 12
3.9. Membangun Hubungan dan Jejaring Kolaboratif 14

4. Menerjemahkan Pelajaran Menjadi Pengamalan (dan Kembali ke Teori) 15
4.1. Sebaran Kapasitas di Semua Tingkat dan di Seluruh Pemerintahan untuk Menggunakan Bukti 15

5. Kesimpulan dan Pesan Kunci 17

Daftar Pustaka 20

Singkatan dan Akronim

DPME	:	Department of Planning, Monitoring and Evaluation (Departemen Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi)
DST	:	Department of Science and Technology (Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
HSRC	:	Human Sciences Research Council (Dewan Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora)
M&E	:	Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
PCAS	:	Policy Coordination and Advisory Service (Badan Koordinasi dan Penasihat Kebijakan)
SONA	:	State of the Nation Address (Pidato Kenegaraan Presiden terkait laporan status serta rencana kerja pemerintah untuk tahun mendatang)

Ringkasan Eksekutif

Saat ini, banyak negara telah menerapkan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pendekatan serta metodologi ini pun diadopsi untuk memengaruhi kebijakan. Namun, ditempatkan dalam konteks berbeda, terutama dalam bingkai negara-negara berkembang dan demokrasi muda seperti Afrika Selatan, pelaksanaan hal serupa masih sulit terlihat. Makalah ini memberikan konteks terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan menyajikan studi kasus berupa penggunaan bukti dalam mengkaji dan merefleksikan 20 tahun demokrasi di Afrika Selatan. Kajian tersebut dilakukan oleh badan pemerintah pusat. Dalam prosesnya, terdapat banyak pelajaran seputar mendapatkan, menganalisis, dan menggunakan bukti dari dalam ranah kebijakan.

Interaksi kebijakan dan riset diwarnai persaingan; sejauh mana bukti digunakan merupakan fenomena konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan bukti apa yang dinilai, dan mengapa. Sejarah menjadi penting, mengingat pembuatan kebijakan dan keputusan dipengaruhi banyak hal. Penting untuk memahami apa yang dimaksud "berpikir berorientasi bukti" ("evidence thinking"), jika kebijakan berbasis bukti hendak dterapkan ke dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Afrika Selatan telah menetapkan komitmen melakukan kajian lima tahunan untuk melihat hasil kerja dan kemajuan yang dicapai. Hasilnya didokumentasikan sebagai bahan rujukan pemerintah selanjutnya. Proses ini merupakan tugas besar yang memobilisasi peneliti berbagai sektor, lembaga penelitian kunci, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menggunakan data dan informasi agar dapat menyusun narasi berbasis bukti mengenai sejarah berdirinya Afrika Selatan sebagai sebuah negara; bagaimana Afrika Selatan tiba di posisinya saat ini, dan apa yang diperlukan untuk melangkah ke depan.

Bergerak di lanskap kebijakan membutuhkan pandangan strategis sehubungan dengan adanya jaringan kompleks para aktor/pemain yang memengaruhi kebijakan. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam proses kajian di atas, yang memperkuat pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam konteks Afrika Selatan adalah:

- Hal-hal selain bukti turut memengaruhi kajian kebijakan
- Konsensus dan intermediasi antara peneliti dan pembuat kebijakan bergantung pada mereka yang berperan sebagai pemerjuang bukti *(evidence champion)*
- Pegawai pemerintah di tingkat manajer dapat menjadi penghasil bukti
- Penyusunan narasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait sedini mungkin

Saat terdapat beberapa badan yang

beroperasi di dalam lanskap kebijakan yang sama dan saat “aturan main” tidak dikomunikasikan dengan jelas, atau tidak dipahami para aktor dengan cara yang sama, kompleksitas di sektor publik tidak dapat dihindari. Kompleksitas juga menjadi ciri inheren tata kelola dan sistem manajemen publik, yang memengaruhi beberapa proses dan sistem yang penting bagi penggunaan bukti. Hal ini termasuk sistem informasi dan data, proses mendapatkan bukti terbaik, produksi pengetahuan melalui analisis dan sintesis yang efektif, proses bekerja dengan bukti yang dilakukan melalui diskusi, perbaikan tingkat respons, dan hubungan serta jejaring yang bersifat kolaboratif.

Pengalaman melakukan kajian di Afrika Selatan menunjukkan bahwa pembuat kebijakan menggunakan bukti dalam arti luas, meskipun ada perbedaan derajat intensitas dan tujuan. Bagi pejabat pemerintah senior yang turut dalam proses kajian, yang ditekankan adalah telaah kritis, penafsiran, analisis, dan sintesis bukti melalui diskusi dan perundingan. Inilah pelajaran kunci yang muncul dari proses kajian. Pertanyaan perihal kapasitas menggunakan bukti pada tingkat individu, organisasi, sistem, dan lembaga harus dijawab secara kolektif. Restrukturisasi lembaga perlu dilakukan agar praktik berbasis bukti bisa diterapkan dan didukung, terutama saat struktur baru diperkenalkan. Dengan begitu, konseptualisasi penggunaan bukti dalam realita kontekstual mewajibkan para aktor untuk bergerak melampaui perbedaan antara pembuat kebijakan dan peneliti agar dapat terus mengedepankan pembuatan kebijakan berbasis bukti.

1 Pendahuluan

Peran bukti dalam pembuatan kebijakan telah dicatat secara luas. Secara umum, sudah diterima bahwa tingkat penggunaan bukti adalah hasil konstruksi sosial berdasarkan bukti apa yang dinilai dan alasannya. Pemahaman ini memengaruhi "perilaku pencarian bukti" *(evidence-seeking behavior).* Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan bukti dalam kebijakan telah menghasilkan suatu diskursus di antara penghasil dan pengguna penelitian maupun jenis bukti lainnya (Sutcliff et al. 2005; Davies & Wright 2009; Newman et al. 2012; Liverani et al. 2013; Oliver et al. 2014; Wesselink et al. 2014). Berasal dari Pemerintah Inggris, pendekatan kebijakan berbasis bukti kian diminati sebagai metodologi untuk menggerakkan berbagai pemain agar mereka secara aktif turut mencari, menganalisis, dan menggunakan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak negara telah mempelajari pengalaman Inggris dalam hal ini dan mengadopsi pendekatan serta metodologi tersebut. Namun, penerapannya dalam konteks dan praktik kebijakan berbeda masih sulit terlihat, terutama di negara berkembang dan demokrasi muda seperti Afrika Selatan. Seiring dengan meningkatnya upaya untuk melibatkan dan menggunakan pendekatan tersebut di Afrika Selatan, praktik membuat kebijakan berbasis bukti didokumentasikan dengan berbagai warna pengalaman dan sudut pandang. Kritik, baik positif dan negatif, pun muncul terhadap logika pendekatan tersebut, mekanisme, dan asumsi dasar yang dimilikinya.

Pegawai pemerintah jarang mendokumentasikan dan mengungkapkan pengalaman maupun praktik yang dilakukannya mengenai bagaimana bukti sebenarnya didapat, dianalisis, dan digunakan dalam konteks kebijakan – terutama dalam implementasi dan pengkajian kebijakan. Padahal, akses, penafsiran, analisis, dan penggunaan bukti sebagai bahan bagi kemajuan dan kinerja intervensi-intervensi pemerintah adalah elemen inti dari semua proses kebijakan publik.

Makalah ini mengontekstualisasikan pembuatan kebijakan berbasis bukti melalui studi kasus mengenai penggunaan bukti dalam mengkaji dan melihat kembali perjalanan 20 tahun demokrasi di Afrika Selatan. Dengan demikian, makalah ini memberikan pandangan tentang penerapan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dari dalam wilayah kebijakan itu sendiri. Pencapaian 20 tahun demokrasi adalah tonggak penting bagi Afrika Selatan, yaitu saat perubahan bisa diukur secara efektif pada tingkat nasional. Sejak awal, tujuannya adalah menggunakan bukti untuk mengisahkan seberapa jauh negeri tersebut telah beranjak sejak tahun 1994. Proses pengkajian perjalanan 20 tahun memakan waktu 18 bulan dan keluaran utamanya adalah sebuah laporan sintesis dengan 21 makalah berlatar belakang tematik. Kajian ini kemudian memberikan pelajaran penting dalam proses penerapan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam konteks Afrika Selatan.

2 Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti di Afrika Selatan

Sejarah punya peran penting. Pertemuan kebijakan-penelitian adalah ranah politis yang diwarnai tingginya kompetisi di Afrika Selatan; tujuan nya adalah memastikan bahwa kebijakan yang tepat sudah dibuat dan prioritas strategis telah dicakup dalam agenda. Sebelum 1994, rezim apartheid bergantung pada dewan-dewan ilmu pengetahuan sebagai badan penelitian pemerintah. Badan-badan ini menghasilkan bukti selektif untuk membuktikan hasil-hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini menyalahi ciri bukti penelitian yang seharusnya bebas pengaruh, terutama yang dihasilkan oleh ilmuwan sosial. Pemerintah demokratis yang baru menggunakan bukti untuk membuat kerangka hukum dan kebijakan berdasarkan hak-hak asasi manusia, utamanya memperhatikan nasihat dari Komisi Presiden untuk Reformasi Pelayanan Publik (Presidential Commission for Public Service Reform) yang dibentuk Presiden Nelson Mandela. Komisi ini lantas berlanjut kepada restrukturisasi lembaga kepresidenan dan pembentukan Badan Koordinasi dan Penasihat Kebijakan (Policy Coordination and Advisory Service/PCAS) di periode kepresidenan kedua. PCAS didirikan sebagai lembaga think tank yang memberikan nasihat kepada kabinet dan melakukan manajemen kebijakan. PCAS mengusulkan kajian lima tahunan sebagai cara baru untuk memanfaatkan bukti-bukti penelitian. Kajian lima tahunan yang dilakukan pada periode kedua tersebut berlanjut dengan dokumentasi "Kajian Sepuluh Tahun" sebagai kajian komprehensif pertama setelah demokrasi dijalankan. Pengalaman dalam proses ini memperlihatkan kelemahan pemerintah Afrika Selatan dalam mengumpulkan dan menggunakan data secara sistematis untuk mengembangkan kebijakan dan memberikan layanan.

Pada 2005, terjadi pergeseran ke arah yang lebih positif dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti – yaitu ketika kebijakan pemantauan dan evaluasi (M&E) yang meluas di pemerintahan diadopsi oleh kabinet. Kebijakan ini hendak melembagakan praktik M&E pemerintah. Melihat restrukturisasi dan transformasi dewan ilmu pengetahuan dan universitas-universitas, kebutuhan untuk memahami kontribusi dan dampak penelitian maupun bentuk lain dari bukti terhadap keluaran kebijakan dan kemajuan masyarakat dirasa semakin besar. Pada 2009, pemerintah yang baru meningkatkan fokus terhadap M&E sebagai mekanisme peningkatan layanan. Hal ini terlihat dari dibentuknya Departemen Kinerja (kini Perencanaan), Pemantauan, dan Evaluasi (DPME). Departemen ini hendak menguatkan penggunaan M&E di kalangan pemerintah dan menyumbang terhadap penguatan kinerja pemerintah. Pembentukan departemen ini juga didasari oleh paradigma bahwa perbaikan dalam hal penggunaan bukti bisa menguatkan kebijakan dan pengambilan keputusan serta implementasinya. Dengan demikian, etos pembuatan kebijakan berbasis

bukti dan prinsip-prinsip dasar mencari dan menggunakan bukti sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan telah sejak awal disertakan dalam perjalanan demokrasi Afrika Selatan.

Dalam suatu analisis kritis mengenai penggunaan pembuatan kebijakan berbasis bukti di Afrika Selatan yang terbit pada 2012, Du Toit menyerukan perlunya mengonseptualisasikan ulang pendekatan yang ada saat ini dan lebih mendekatkannya pada konteks realita Afrika Selatan. Dalam argumennya dikatakan bahwa permasalahannya tidak terletak pada kurangnya akses pembuat kebijakan terhadap bukti ilmiah yang cukup, melainkan pada kurangnya "analisis yang layak." Tantangannya adalah bagaimana menyediakan bukti sekaligus menyusun analisis yang meyakinkan mengenai perubahan sosial dengan berpijak pada realita sosial. Du Toit mengajukan pertanyaan utama: apa yang dianggap sebagai bukti? Apa artinya? Siapa yang terlibat? Bagaimana bukti dikomunikasikan? Semua hal ini secara inheren politis, dapat diperdebatkan, dan menyangkut upaya memahami bukti, di mana "... baik ilmuwan maupun pembuat kebijakan terlibat dalam praktik-praktik pemaknaan dan di dalamnya bukti memainkan peran penting, meski diwarnai kompetisi" (Du Toit 2012, 5).

2.1. Pengaturan Kelembagaan

Sebagai bagian dari proses transformasi pascademokrasi di komunitas keilmuan, dorongan-dorongan politik dan ekonomi kemudian menghasilkan pengembangan Sistem Nasional Inovasi dan Penelitian (National System of Innovation and Research) untuk merekonstruksi komunitas keilmuan yang kompeten, dengan tujuan memastikan adanya pasokan bukti penelitian berkualitas tinggi. Hal ini membutuhkan pendirian sejumlah lembaga baru dan restrukturisasi lembaga yang ada, termasuk transformasi praktik manajemen, pencarian informasi, dan cara-cara penggunaan informasi sebagai rujukan keputusan, kebijakan, dan praktik.

Sejak 2008, pemerintah Afrika Selatan menjadi penyandang dana utama penelitian dan pengembangan – sebagian besar dana diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan. Meskipun sistem penelitian dan para ahli terkemuka telah ada, namun pembuat kebijakan dan anggota komunitas penelitian masih mempertanyakan sumbangsih dan dampak penelitian serta bukti lain terhadap hasil pembangunan dan kemajuan masyarakat. Ada kesenjangan besar yang diidentifikasi dalam pembuatan riset untuk kebijakan dan riset implementasi, yang sedianya menjadi bahan rujukan penerjemahan kebijakan-kebijakan progresif menjadi program dan intervensi; dan bagaimana program tersebut menunjukkan tingkat efisiensi, efektivitas, kontribusi, serta dampak penelitian terhadap agenda pembangunan nasional.

Bagan 1 memetakan aktor yang saat ini memengaruhi bukti sejak pendirian DPME pada 2010. Departemen-departemen pemerintah pusat lainnya yang memandu pengembangan riset kebijakan tengah melihat ulang peran dan fungsinya dalam memajukan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Mereka mengoordinasikan upaya untuk menguatkan peran pemerintah dalam ekonomi pengetahuan. Membangun kapasitas lembaga agar dapat menyatukan pendekatan kebijakan berbasis bukti berarti peran dan tanggung jawab tersebut harus didefinisikan sebagai fungsi; diubah menjadi struktur baru dan relevan, dan dimasukkan ke dalam upaya koordinasi dan integrasi kerja-kerja terkait bukti. Peran menentukan agenda penelitian, pialang pengetahuan, pemerjuang riset kebijakan, dan pengembangan kapasitas dinilai sebagai hal-hal mendasar bagi semua departemen pemerintah pusat agar dapat memberikan dampak terhadap sasaran-sasaran pembangunan.

Bagan 1: Pemetaan Aktor yang Memengaruhi Agenda Bukti DPME

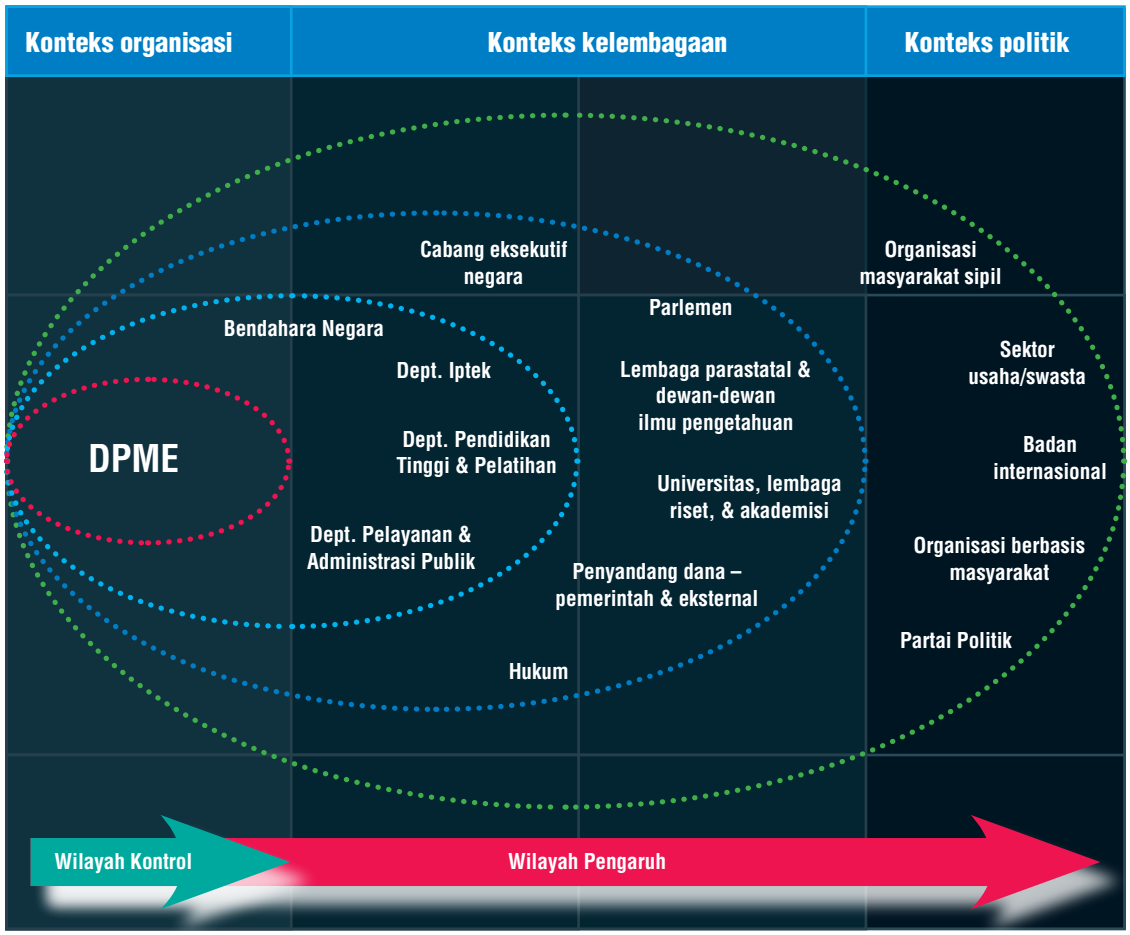

2.2. Memahami "Berpikir Berorientasi Bukti"

Memahami sifat "berpikir berorientasi bukti" *(evidence thinking)* di kalangan pembuat kebijakan sangat penting apabila ingin memengaruhi tuntutan dan penggunaan bukti secara positif. Pada 2010/2011, pemerintah mengadakan penelitian untuk menilai sikap pembuat kebijakan senior terhadap penggunaan bukti. Penelitian ini mewawancarai 55 manajer senior layanan publik. Hasil studi menunjukkan bahwa pembuat kebijakan cenderung menggunakan sumber-sumber bukti yang kurang formal meskipun mereka mengakui perlunya bukti yang lebih substantif, ilmiah, dan berbobot (lihat bagan 2). Selain bukti, mereka melihat pengalaman dan keahlian, kemampuan menilai, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi, sumber daya, dan kelompok penekan adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi kebijakan (lihat Bagan 3). Dalam survei tersebut, situasi saat ini dibandingkan dengan perubahan ke depan terkait faktor apa saja yang "seharusnya" memengaruhi kebijakan. Bagan 3 memperlihatkan bahwa subjek studi mengakui adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap bukti untuk memengaruhi kebijakan.

Temuan-temuan ini signifikan karena menyandingkan bukti dengan bahan pertimbangan dan faktor penting lain, seperti sumber-sumber yang memengaruhi kebijakan dan keputusan. Banyak peneliti dan lembaga penelitian Afrika Selatan berkontribusi kepada pendekatan kebijakan berbasis bukti melalui penyusunan panduan, alat komunikasi, dan metodologi untuk

Bagan 2: Tipe Bukti yang Paling Sering Digunakan dalam Pembuatan Kebijakan dan Keputusan

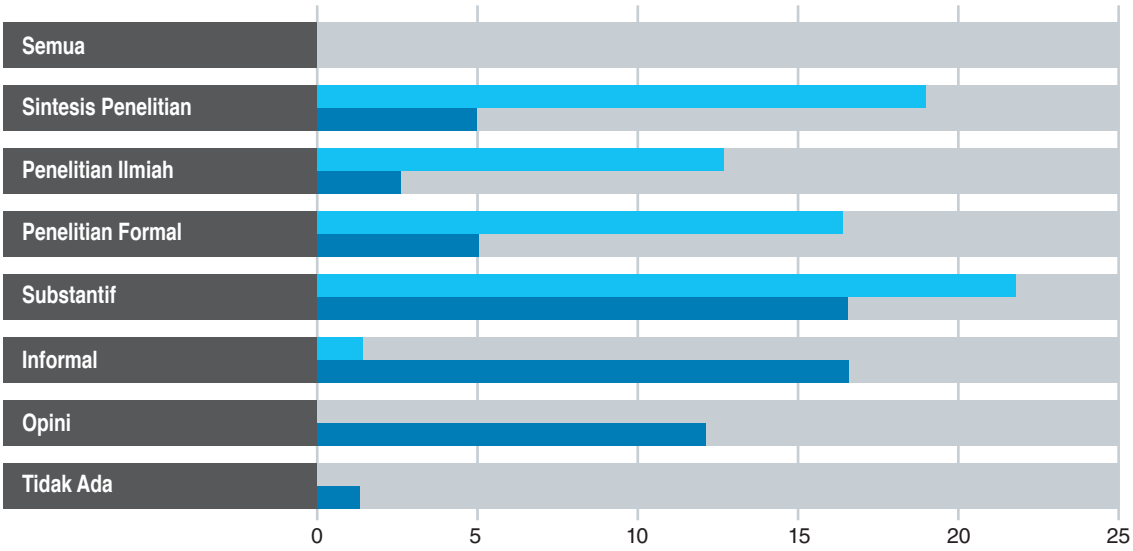

Aktual
Lebih dari

Sumber: Paine Cronin, G. & Sadan, M., 2015, 'Use of evidence in policy making in South Africa: An exploratory study of attitudes of senior government officials', African Evaluation Journal 3(1), Art. #145

memastikan bukti disertakan di dalam proses penyusunan kebijakan (ASSAF 2006; Du Toit 2012; Grobbelaar 2014; Bullen 2015). Kritik terhadap pendekatan kebijakan berbasis bukti membuka perdebatan seputar konseptualisasi dan simplifikasi penerapannya berdasarkan asumsi-asumsi utama dalam lingkungan kebijakan Afrika Selatan. Satu hal yang mengejutkan adalah, kekakuan diskursus mengenai kebijakan berbasis bukti ditemukan baik di kalangan peneliti dan pembuat kebijakan terkemuka – yang menyebut pendekatan "berlebihan" (ASSAF 2006) dan "proyek meta-politik" (Du Toit 2012) – maupun pembuat kebijakan skeptis yang masih memandang pendekatan ini sebagai konsep asing. Walau begitu, pendekatan kebijakan berbasis bukti tetaplah memberikan kontribusi penting terhadap diskursus pembuatan kebijakan dan menantang pembuat kebijakan serta peneliti untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat sudah berlandaskan bukti.

Bagan 3: Faktor Utama yang Memengaruhi Kebijakan

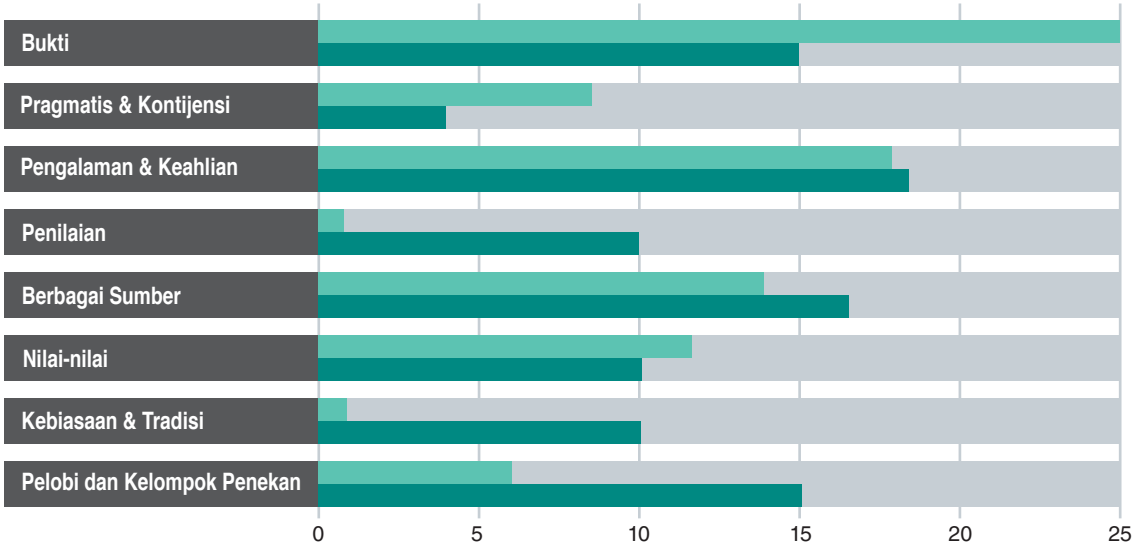

Aktual
Ke depan

Sumber: Paine Cronin, G. & Sadan, M., 2015, 'Use of evidence in policy making in South Africa: An exploratory study of attitudes of senior government officials', African Evaluation Journal 3(1), Art. #145, 10 pages. http://dx.doi.org/10.4102/aej.v3i1.145

2.3. Pertanyaan Kepercayaan terhadap Data

Permasalahan rasa percaya dalam penggunaan bukti di ranah kebijakan Afrika Selatan memiliki jejak sejarah. Saat bukti selektif dimunculkan untuk menjustifikasi kebijakan apartheid dan secara sengaja digunakan untuk mengucilkan mayoritas penduduk dari arus utama pembangunan, konteks menjadi penting. Sejarah ini menyebabkan rasa tidak percaya mengakar kuat di antara pembuat kebijakan dan peneliti, dan menjadi penghalang pertama yang harus diruntuhkan agar penelitian digunakan efektif dalam proses pengkajian kebijakan. Data dan statistik, yang diwarisi oleh demokrasi muda ini, dipertanyakan kredibilitas, validitas, dan representasinya terhadap masyarakat Afrika Selatan. Sebab itu, diperlukan penyegaran data dan konteks informasi secara menyeluruh sebagai dasar menghasilkan bukti. Pertimbangan penting yang menentukan bagaimana bukti dinilai, didapatkan, dan digunakan dalam ranah kebijakan adalah: Siapa yang mengajukan pertanyaan, dan seperti apa pertanyaan itu? Siapa yang menghasilkan bukti? Siapa yang menafsirkan dan menganalisis temuan?

3 Proses Kajian 20 Tahun – Studi Kasus

Pemerintah demokrasi baru Afrika Selatan berkomitmen melakukan kajian lima tahunan untuk melihat kerja-kerja dan kemajuan yang dicapainya. Hasil kajian diberikan kepada pemerintah berikutnya. Kajian ini merupakan tugas besar yang melibatkan peneliti dari berbagai sektor, lembaga penelitian kunci, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menggunakan data dan informasi sebagai dasar narasi berbasis bukti. Narasi ini melihat dari mana Afrika Selatan berasal sebagai sebuah masyarakat, bagaimana ia sampai di titik saat ini, dan apa yang bisa diubah untuk perjalanan berikutnya. Bukti penelitian dihasilkan dan digunakan secara luas saat kajian tahun ke-10 dan ke-15 dilaksanakan. Data dan informasi sudah sangat meningkat dari segi kuantitas, kualitas, dan relevansi. Namun, masih ada keterbatasan dalam hal kontribusi temuan penelitian, mengingat data yang ada tidak cukup dan kerap tidak bisa diandalkan. Melihat pelajaran dari pengalaman kajian sebelumnya, pendekatan produksi dan penggunaan bukti lebih diarahkan kepada kajian tahun ke-20, yang sedianya menjadi kajian yang komprehensif dan reflektif mengenai kemajuan "Pidato Kenegaraan Presiden (SONA)" sejak demokrasi bermula.

Pada 2012, kabinet menyetujui rencana kajian tahun ke-20, diikuti oleh pembentukan komite yang terdiri dari menteri dan kepala departemen untuk memandu manajemen dan implementasi kajian. Terdapat struktur tata kelola yang jelas dan fungsional untuk memberikan pengawasan dan arah strategis terhadap manajemen dan implementasi keseluruhan proyek sebagaimana ditampilkan dalam peta proses di bawah ini.

Bagan 4: Struktur Manajemen Kajian Tahun ke-20 Berbasis Bukti

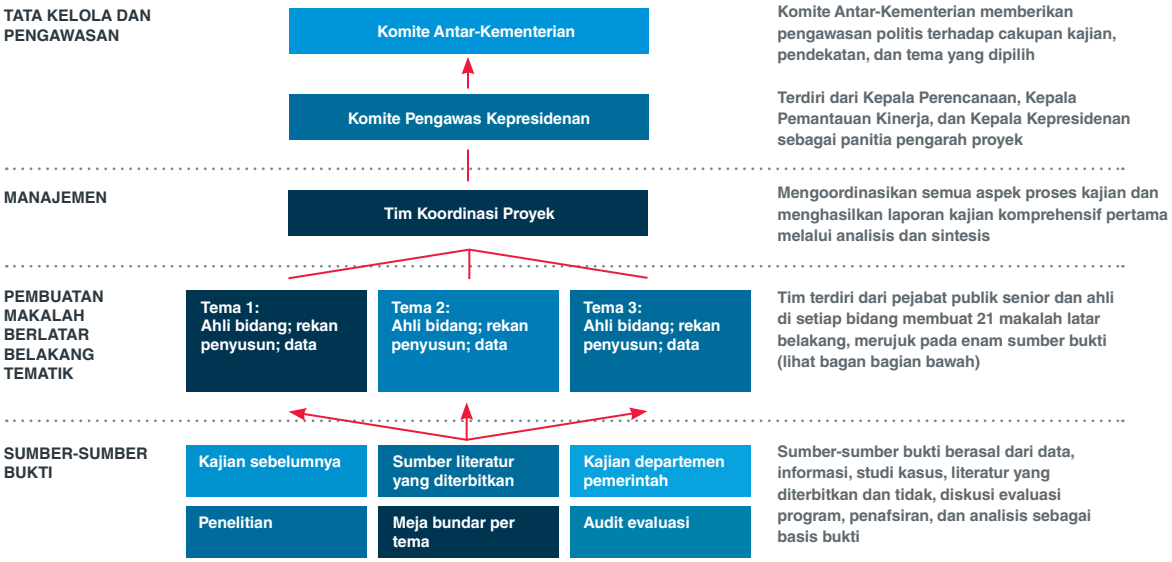

Data, informasi, dan temuan didapatkan dari enam sumber untuk menyusun basis bukti yang komprehensif sebagai rujukan ke-21 area tematik untuk dimasukkan ke dalam proses kajian:

1. Kajian dan sintesis data dan informasi yang dikumpulkan sepanjang masa kepresidenan – Data dan informasi ini menjadi sumber pertama bukti yang perlu dilihat, merujuk pada memori kelembagaan sejak pemerintah demokratis pertama.
2. Penelitian berdasarkan permintaan *(commissioned research)* – Acara khusus menjawab jurang yang diidentifikasi oleh pejabat pemerintah senior terkait basis bukti. Peneliti, lembaga penelitian, akademisi dikerahkan untuk menghasilkan bukti penelitian per tema sebagai rujukan dalam proses kajian.
3. Refleksi departemen pemerintah mengenai kemajuan/tantangan yang ada – Ajakan melakukan kajian sendiri diserukan di tingkat nasional dan daerah terhadap, utamanya, data administratif dan informasi hasil pemantauan, studi kasus kualitatif, dan pengetahuan lokal.
4. Penelitian ilmiah atas literatur – Kegiatan dilakukan untuk setiap 21 tema oleh ahli informasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang penting tidak terlewatkan dalam pengumpulan data awal. Kegiatan ini dipandu oleh strategi pencarian yang dirancang meliputi cakupan dan tujuan kajian.
5. Mengadakan 21 acara meja bundar sebagai cara menjalin keterlibatan – Mengajak perwakilan pejabat publik, pembuat kebijakan, peneliti, masyarakat sipil, dan penduduk biasa untuk terlibat secara kolektif dalam basis pengetahuan. Bukti dihasilkan melalui penafsiran dan analisis data dan informasi yang tersedia via dialog dan diskusi per tema yang akan dipertimbangkan oleh pembuat konten.
6. Audit evaluasi – Dihadirkan sebagai sumber baru mengevaluasi bukti dengan tujuan menilai kinerja pemerintah dalam implementasi sejumlah intervensi kunci.

Temuan proses kajian divalidasi melalui metode formal dan informal. Tim-tim terdiri dari 52 manajer senior menulis makalah tematik sebagai makalah latar belakang yang menggabungkan bukti-bukti yang ada. Makalah melalui penilaian sejawat yang dilakukan oleh ahli bidang eksternal menggunakan pendekatan buta *(double blind).* Sejumlah lokakarya internal kemudian diselenggarakan, membawakan tema-tema yang sudah dikelompokkan untuk memvalidasi input terpisah serta menangkap tema kunci atau lintas sektor *(cross-cutting).*

Kajian sebesar ini, dengan tujuan memastikan prosesnya berlandaskan bukti, mencakup dua proses kompleks. Rencana kajian yang menguraikan pendekatan yang diambil secara jelas menyatakan, "... menggunakan bukti untuk memperlihatkan kepada pembuat kebijakan, publik, dan pemangku kepentingan mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi..." (DPME, 2012). Namun, panduan tidak banyak menjelaskan mengenai bukti seperti apa yang perlu diakses, ke mana mengaksesnya, kapankah bukti yang layak bisa didapatkan, siapa yang akan menilai dan menafsirkan bukti, dan bagaimana bukti digunakan dalam proses kajian.

3.1. Bergerak di Ranah Kebijakan

Penguatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam demokrasi dan ekonomi pengetahuan muda seperti Afrika Selatan merupakan peluang sekaligus tantangan dalam memajukan budaya pemanfatan bukti. Kemauan politik penting untuk mendorong agenda nasional yang terencana dan strategis dengan politisi merespons "bukti" yang didapat dari konstituen masing-masing berdasarkan mandat yang diterima. Menerjemahkan sasaran visioner dan strategis ke dalam kebijakan yang bermanfaat bagi publik terjadi dalam konteks yang dinamis secara sosial – tempat banyak intervensi dan faktor memengaruhi hasil, dan bisa menyebabkan dampak yang diinginkan maupun tidak.

Memahami apa yang dikerjakan, mengapa, dan untuk siapa kebijakan tersebut, sangat penting bagi pembuat kebijakan. Pada gilirannya, rakyat harus dapat menuntut akuntabilitas para pembuat kebijakan dan menggunakan bukti berdasarkan pengalamannya sendiri. Komunitas penelitian dibutuhkan untuk menghasilkan bukti relevan untuk melihat keefektifan kebijakan. Dunia usaha dan masyarakat sipil diharapkan berkontribusi terhadap sasaran pembangunan dan prioritas nasional dengan menyumbangkan pengetahuan baru maupun inovasi sosial.

Jadi, ada jaring kompleks berisi para aktor yang memengaruhi proses kebijakan. Namun, pemisahan yang masih terus berlangsung antara pihak yang dianggap sebagai penghasil bukti (peneliti) dan pihak yang diharapkan menggunakan bukti (pembuat kebijakan) ke dalam hanya dua kubu acap kali terlampau menyederhanakan. Akibatnya, upaya menjembatani pemisahan tersebut melalui komunikasi penelitian dan jasa-jasa perantara meningkat. Sementara, banyak peneliti tetap abai terhadap realita proses kebijakan dan di sisi lain tuntutan dari pembuatan kebijakan terhadap bukti-bukti dari penelitian tetap rendah.

3.2. Mengelola Kompleksitas untuk Meningkatkan Penggunaan Bukti

Kompleksitas di sektor publik tidak bisa dihindari saat berbagai badan beroperasi di ranah kebijakan yang sama dan saat aturan main tidak diberikan secara jelas atau dipahami dengan seragam oleh semua badan. Untuk menghadapi kompleksitas dalam pemerintahan dibutuhkan strategi efektif dalam hal pengelolaan aktor dan proses terkait agar bisa terus maju dan memberikan pencapaian atau hasil pembangunan yang diinginkan. Proses kajian membuat tim manajemen secara langsung harus menghadapi kompleksitas dalam ranah kebijakan publik dan pentingnya mengelola sejumlah aktor maupun proses secara bersamaan, apabila sasaran – yaitu penggunaan bukti – ingin dicapai.

Dengan begitu, kompleksitas pelaksanaan kajian harus dikelola secara sengaja dan proaktif agar berhasil. Sejumlah kompleksitas ini ada di dalam tata kelola publik dan sistem manajemen, sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan kompleksitas lain penting untuk menguatkan kebijakan berbasis bukti dan dianalisis lebih jauh.

- Kapasitas mengkaji kebijakan oleh pejabat publik dari segi administrasi lemah dan hal ini juga melemahkan pihak eksekutif dalam hal implementasi kebijakan;
- Sektor-sektor pemerintah memahami dan menerapkan pendekatan bukti secara berbeda;
- Ketersediaan data/informasi tidak merata; ada sektor yang mengalami kelebihan data dan ada yang mengalami kekurangan data;
- Pengarahan *(briefing)* pembuat kebijakan dan pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki waktu terlibat dengan temuan-temuan penting dalam dokumen;
- Kelesuan dan rendahnya motivasi di antara pejabat publik terhadap kebijakan publik dan prioritas pemerintah; dan
- Sistem manajemen pengetahuan dan praktiknya yang lemah di pemerintahan secara umum.

3.3. Tantangan Data dan Sistem Informasi

Afrika Selatan memiliki komunitas riset yang mapan dan diakui secara internasional. Negara ini telah melampaui masalah kemiskinan data, meskipun tantangan integrasi dan koordinasi masih ada. Ilmuwan data telah direkrut ke dalam proyek ini untuk membantu proses validasi data dengan arahan strategis dan pengawasan dari manajemen. Pengamatan penting yang muncul dalam proses pencarian bukti adalah kelangkaan data dan informasi di sektor tertentu, serta informasi yang tidak cukup dan tidak bisa diandalkan di sektor sosial yang penting. Kalaupun tersedia informasi, dibutuhkan proses menyortir dan menyaring bukti yang memang berguna dan relevan untuk analisis kebijakan. Jika bukti

terbatas, perlu didokumentasikan sebagai temuan untuk ditindaklanjuti segera. Dampak revolusi data dan informasi harus dikelola untuk meminimalkan risiko penumpukan informasi secara berlebihan.

Namun, data saja belum cukup untuk menyampaikan suatu narasi, meskipun dapat menjadi dasar menghasilkan bukti. Tabel berikut menyajikan tantangan utama seputar data dan informasi dalam proses pencarian bukti.

Tabel 1: Tantangan Data Memengaruhi Penggunaan Bukti

Tantangan	Pelajaran/Peluang	Aktor Relevan dalam Konteks Afrika Selatan
Tidak semua ahli bidang, pejabat pemerintah, atau pembuat kebijakan senior paham nilai bukti	Peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk pembuat kebijakan mengenai penggunaan bukti	Pembuat dan pembentuk kebijakan senior; pejabat pemerintah yang menugaskan penelitian
Keyakinan hanya survei dengan sampel yang bisa memberikan pengetahuan tentang fenomena sosial kompleks; data bentuk baru tidak dilihat sebagai bukti (misal visual, data kualitatif, metadata)	Analisis kualitatif dan naratif mengenai seberapa jauh Afrika Selatan telah berubah sebagai negara, paling bagus dipaparkan menggunakan bukti visual, terutama jika tidak ada data yang bisa membuktikan kemajuan	Badan pusat statistik perlu melihat nilai data baru untuk deskripsi dan analisis bersifat *real time;* komunikasi pemerintah diakui sebagai aktor kredibel dalam produksi data baru dari media sosial
Akses terbatas terhadap data ilmu-ilmu sosial dan tidak ada ilmuwan sosial dalam kerja-kerja kebijakan	Kenali semua hambatan akses data ilmu sosial, terutama jika data dihasilkan oleh penelitian yang didanai oleh anggaran publik. Kaitkan data sosial dengan hasil/ dampak kebijakan	Human Sciences Research Council (HSRC) dan Department of Science and Technology (DST) memfasilitasi dan mengatur akses data sosial
Tidak ada konsensus atas definisi dan klasifikasi, menyebabkan metodologi pengumpulan data tidak konsisten	Data kemiskinan; definisi desa/kota; definisi medis dan sosial untuk disabilitas; gender	OMS, akademisi, pemerintah harus menyepakati definisi
Data historis sebelum 1994 tidak tersedia sebagai perbandingan	Ahli humaniora dan sejarah harus lebih aktif mengumpulkan, mengarsipkan, mengelola, dan menyimpan data sejarah	National Humanities Institute; Departemen Pendidikan Tinggi dan Pelatihan (Dept. of Higher Education and Training);
Kurang kemampuan statistik dan kapasitas analisis semua jenis bukti tidak merata	Forum data sebagai mesin transformasi lingkungan data; Mendorong relevansi kebijakan dan interpretasi informasi statistik dimasukkan dalam kurikulum sarjana jurusan ilmu sosial	Universitas, DST, dan Dewan Ilmu Pengetahuan mengarahkan sumber daya untuk pelatihan
Mengidentifikasi kesenjangan bukti sebagai dasar kebijakan dan pembangunan	Duplikasi pengumpulan data dan efisiensi didapat dari penyusunan rencana bukti tingkat nasional, provinsi, dan daerah secara kolektif – proses ini akan menentukan kebutuhan data, misal diketahui data usaha kecil tidak banyak	Pembuat kebijakan, ahli dunia usaha secara teratur melihat perkembangan sektor, pembuatan kebijakan, dan implementasinya
Mutu data administratif rendah	Memperhatikan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data mikro di tingkat fasilitas, daerah, provinsi, dan nasional untuk semua sektor. Sistem komputer butuh sistem TI yang efektif sebagai dukungan teknis	Manajer program, unit M&E, dan peneliti di pemerintah mendokumentasikan rencana data
Penjagaan dan integrasi data minimal: data mikro, metadata	Dengan produksi data yang lebih baik, penyimpanan data melalui jasa kurasi dan komunikasi efektif akan memungkinkan data digunakan ulang untuk analisis	Data dikumpulkan dengan benar; bangun kemitraan efektif dengan kurator data lain agar data bisa menjadi aset nasional

3.4. Mendapatkan Bukti Terbaik

Untuk mengatasi kekurangan data, dikerahkan upaya untuk mencari bukti terbaik yang ada sebagai dasar isi kajian. Keenam sumber bukti yang disebutkan di atas hendak memberikan pendekatan yang berimbang, menggunakan temuan ilmiah maupun sumber literatur yang belum diterbitkan sebagai bukti. Namun, asumsi tersedianya bukti yang memadai, dan bahwa ada akses yang jelas terhadap data, informasi, dan riset kebijakan tersebut tidak terbukti. Hal ini menjadi hambatan besar dan mempertajam kritik terhadap kelemahan kebijakan berbasis bukti.

Kurangnya riset kebijakan yang memadai, langkah perubahan sosial yang tidak efektif, dan ketiadaan akses terhadap data ilmu-ilmu sosial membatasi penilaian dan interpretasi bukti yang saksama dan menyeluruh. Namun, ada sektor seperti kesehatan, keamanan, dan penyediaan layanan yang berhasil mempertahankan keterlibatan masyarakat yang kuat dan aktif sehingga memastikan akuntabilitas pemerintah. Sektor-sektor ini juga menikmati adanya bukti yang relatif lebih baik dan dari sumber-sumber yang berimbang. Dengan begitu, sektor yang berbeda memiliki titik bermula yang juga berbeda dalam hal "berpikir berorientasi bukti", dan menghadapi tantangannya sendiri dalam hal ketersediaan bukti yang "terbaik" dan "tepat".

Basis pengetahuan infrastruktur ekonomi, misalnya, tidak ada di Afrika Selatan. Sehingga, pemerintah pun mengawali penelitian primer di bidang ini dalam kajian-kajian berikutnya. Pencarian literatur ilmiah menemukan banyak studi yang masing-masing adalah riset kecil dengan sampel terbatas, temuan yang tidak bisa digeneralisasi, dan sintesis penelitian minimum di luar bidang kesehatan. Pembuat kebijakan dan pejabat senior sebagai pemerjuang kajian tematik *(thematic champion)* pun terpaksa menghasilkan bukti melalui pengalaman kolektif mereka, analisis, dan interpretasi bukti yang ada.

3.5. Menghasilkan Pengetahuan Melalui Analisis dan Sintesis yang Efektif

Berbagai metodologi yang mengedepankan pendekatan kebijakan berbasis bukti telah dikembangkan untuk memfasilitasi pemanfaatan penelitian menjadi kebijakan. Penilaian Bukti dengan Cepat *(Rapid Evidence Assessment)*, Pemetaan Bukti *(Evidence Mapping)*, dan Peta Kesenjangan *(Gap-maps)* menyajikan metodologi yang sudah diadaptasi dan perangkat komunikasi yang efektif menunjang relevansi kebijakan dan untuk memberikan hasil yang tepat waktu. Lepas dari kemajuan-kemajuan dalam kebijakan berbasis bukti, sintesis penelitian belum diterapkan secara luas di kalangan komunitas riset Afrika Selatan. Dengan begitu, ketersediaan Kajian Sistematis dan Penilaian Cepat Bukti yang bisa menjadi rujukan dalam proses kajian kebijakan sangatlah terbatas. Pembuat kebijakan yang mengetahui metodologi sintesis penelitian meminta komunitas riset untuk memberikan riset yang relevan dengan kebijakan. Pada waktu yang sama, banyak pejabat senior dan pembuat kebijakan yang tidak mengetahui metodologi ini sehingga tidak ada permintaan yang muncul. Jika bukti hendak dipromosikan secara aktif dan penggunaannya difasilitasi dalam ranah kebijakan, perlu ada suplai bukti relevan yang memadai dari komunitas riset agar bisa dirujuk dalam proses pembuatan kebijakan.

Temuan riset individual tidak dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kebijakan dan menjadi dasar arahan ke depan. Pengalaman Afrika Selatan memperlihatkan bahwa membangun ideologi dan konsensus adalah tahap penting yang perlu dilakukan dan yang akan membantu mengidentifikasi pilihan-pilihan terbaik yang ada. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan pilihan yang diambil pada 1994, saat ideologi politik berbeda harus bekerja sama menyepakati sasaran strategis.

3.6. Proses Perundingan dalam Bekerja Menggunakan Bukti

Selama kajian tahun ke-20, proses perundingan diadopsi untuk memastikan setiap langkah kajian didokumentasikan dan informasi diambil serta dikomunikasikan kepada setiap tim. Sasaran kajian, metodologi penelitian, dan kerangka analisis disosialisasikan secara luas dan terus-menerus, sehingga menarik semua pemangku kepentingan ke arah yang sama – terutama saat muncul kebingungan. Platform yang diciptakan bagi pembuat kebijakan, peneliti, ilmuwan data, lembaga riset, dan analis untuk berinteraksi dalam dialog, menghasilkan proses pengembangan isi yang sangat penting, yang harus direkam dan dikomunikasikan kepada tim-tim terkait dan diintegrasikan dengan tema lintas sektor.

Pencatatan dan penulisan notula yang efektif penting untuk memetakan isu-isu yang diangkat, rincian diskusi, dan posisi yang diambil saat bekerja dengan basis bukti. Hal tersebut memberikan kewenangan kepada tim manajemen untuk memandu pengembangan isi. Banyak pertemuan internal digelar untuk memastikan keterlibatan dialog dan debat antara pejabat senior dalam pengembangan isi.

Manajemen riset dan manajemen proyek sebagai dua proses berbeda bertemu di beberapa titik dan di sejumlah area strategis; keduanya bergantung pada tim administratif yang efektif dan efisien untuk dapat menarik bukti dan arus-arus pengetahuan yang muncul. Hal ini dihasilkan melalui individu-individu kompeten, walaupun bersifat ad hoc, selama durasi proyek dan bukan dari dalam sistem yang ada dan fungsional. Selama periode kajian tahun ke-20, hal ini mengungkap kelemahan sistem administrasi dan seringkali ketiadaan sistem manajemen pengetahuan, juga ketidakefektifan organisasi di beberapa departemen pemerintahan.

3.7. Peran Pemerjuang Bukti

Kelompok perantara berisi pejabat senior di dalam tim kajian menjadi "pemerjuang bukti" *(evidence champions)* dalam fasilitas dan penerjemahan bukti riset menjadi informasi yang relevan untuk kebijakan. Para "pemerjuang bukti" ini mampu mempertahankan posisi dengan memberikan tren dan statistik terbaru dari basis bukti yang dimilikinya. Para peneliti, ahli di bidangnya masing-masing, mendominasi saat pejabat publik senior tidak memiliki bukti atau keyakinan yang cukup untuk memperdebatkan isu-isu relevan. Muncul perbedaan interpretasi data statistik dan bukti riset saat bukti dari selain riset dihadirkan – termasuk masukan masyarakat, opini publik, analisis kualitatif, dan studi kasus. Analisis yang efektif menjadi lebih kuat saat semua bukti yang tersedia disajikan, dikomunikasikan, dan dinilai relevansi dan mutunya. Meski demikian, tantangan utamanya adalah para penyusun isi merasa kewalahan menghadapi banyaknya informasi yang masuk. Tanpa dukungan dan kapasitas administrasi yang layak, pemanfaatan bukti (yang sudah dan belum diterbitkan) secara maksimal menjadi terhambat dan tidak merata di semua tim. Dengan demikian, membangun hubungan dan menguatkan jejaring yang ada untuk menghasilkan bukti riset yang relevan menjadi area kerja penting bagi para pemerjuang bukti.

3.8. Memperbaiki Respons – Memahami Tuntutan

Penggunaan bukti meningkat saat ada permintaan dari mereka yang membentuk dan memengaruhi kebijakan, dan saat dukungan administratif bersikap responsif dengan menyediakan data dan informasi yang relevan dan valid secara tepat waktu. Dalam proses kajian, memahami siapa saja yang bergantung pada tipe-tipe bukti berbeda dan kapan mereka membutuhkannya, menjadi pengetahuan penting dalam mengelola pemangku kepentingan. Departemen Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi bekerja dalam lingkungan yang memiliki tantangan dalam penggunaan bukti di ranah kebijakan. Tantangan lain adalah keluaran riset sering kali tidak terakses pembuat kebijakan.

Tantangan-tantangan ini berimplikasi langsung terhadap data yang dikumpulkan (relevansi dengan kebijakan), mengapa dikumpulkan (pengetahuan baru melalui riset ilmiah dibandingkan prioritas nasional dan tujuan pembangunan), cara pengumpulan (metodologi), dan pihak yang mengumpulkan (pemerintah, badan riset independen).

Tahapan siklus kebijakan yang berbeda membutuhkan jenis bukti berbeda. Meskipun tidak pernah berjalan secara berurutan dan sistematis, namun kompleksitas siklus kebijakan dan kekacauan/"kekusutan" di dalamnya penting untuk dipahami agar dapat dikelola dengan baik. Inti dari pemahaman ini adalah kapasitas mendokumentasikan, mengevaluasi, berefleksi, dan belajar dari setiap fase. Proses bekerja menggunakan bukti yang terjadi berulang di Afrika Selatan pada 2014, berkembang menjadi penyusunan model terpadu untuk menemukan di mana dan jenis bukti apa yang diperlukan untuk setiap siklus kebijakan (lihat Bagan 5).

Sebagai hasilnya, DPME telah mengidentifikasi kebutuhan berinvestasi membangun infrastruktur dan jejaring riset yang bisa memfasilitasi suplai riset kebijakan, riset implementasi, dan sintesis riset. Semua hal ini dianggap sebagai mekanisme penting untuk membangun kebutuhan terhadap bukti di Afrika Selatan – memastikan bahwa mereka yang menyuarakan pendekatan kebijakan berbasis bukti juga responsif terhadap kebutuhan para pembuat kebijakan.

Pelajaran ini dikuatkan oleh sebuah diagnosis riset yang baru-baru ini dicapai DPME (DPME, 2015). Diungkapkan bahwa kebutuhan terhadap bukti bergantung pada tingkat senioritas. Mereka yang mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan mensintesis bukti perlu akses kepada berbagai jenis bukti. Mereka yang menganalisis, menafsirkan, atau menilai relevansi, kredibilitas, maupun mutu bukti sebagai rujukan keputusan perlu bukti secara tepat waktu, serta kapasitas untuk menilai secara kritis bukti riset dan membangun jejaring kolaboratif untuk bekerja bersama-sama menggunakan bukti. Hal ini berarti respons terhadap kebutuhan bukti membutuhkan pendekatan berbeda-beda.

Bagan 5: Letak Jenis-Jenis Bukti di Dalam Siklus Kebijakan

Sumber: DPME, 2014

3.9. Membangun Hubungan dan Jejaring Kolaboratif

Upaya mengatasi pemisahan riset-kebijakan tidak hanya soal menjembatani kesenjangan melalui perantara berupa broker pengetahuan yang kompeten dan pengomunikasi yang efektif untuk menerjemahkan riset dan bukti lain agar menjadi informasi strategis dan relevan. Lebih jauh, hal ini berarti membangun hubungan yang efektif dan jaringan kerja sama antara peneliti dan pembuat kebijakan; memperdalam pemahaman kedua pihak mengenai dunia keduanya, melakukan dialog yang berkesinambungan, debat, dan memandu produksi pengetahuan yang relevan untuk prioritas nasional. Perlu diketahui bahwa meskipun peneliti dan pembuat kebijakan bekerja dengan bukti, namun peran dan tujuan bukti berbeda. Komunitas keilmuan didorong rasa ingin berkontribusi membangun pengetahuan baru, sementara pembuat kebijakan didorong rasa ingin mengambil tindakan sosial, membuat perubahan, dan memenuhi aspirasi politik. Bagi peneliti, risiko kehilangan kemandirian sangat tinggi – khususnya mereka yang berhubungan erat dengan pembuat kebijakan, terutama pembuat kebijakan yang mengikuti pendekatan klinis/teknokratis terhadap penyusunan kebijakan, dan pada akhirnya "mencapai target, tetapi tidak memenuhi substansi" (Davies & Wright, 2009).

4 Menerjemahkan Pelajaran Menjadi Pengamalan (dan Kembali ke Teori)

Melihat pelajaran yang dipetik dalam proses kajian tahun ke-10 dan ke-15, dan pengalaman kajian tahun ke-20, terdapat beberapa area penting yang perlu diteruskan jika "berpikir berorientasi bukti" dan praktiknya ingin diterapkan ke dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Pembentukan sistem manajemen pengetahuan yang efektif mulai ada di beberapa departemen pemerintah, tetapi belum menjadi praktik meluas. Dalam birokrasi muda seperti Afrika Selatan, membangun "negara yang mampu" menjadi prioritas di sejumlah area kunci seperti tertera dalam Rencana Pembangunan Nasional (masa Kepresidenan 2013) yang baru-baru ini diterbitkan. Kerja-kerja untuk membuat layanan publik lebih profesional sudah dimulai. Mereka yang mempromosikan dan menggunakan kebijakan berbasis bukti perlu memahami dengan benar konteks tempat mereka bekerja dan mengambil pendekatan dari bawah ke atas untuk dapat menerapkan dan mengintegrasikan "berpikir berorientasi bukti".

4.1. Membangun Sebaran Kapasitas untuk Menggunakan Bukti

Tantangan yang diidentifikasi dan didokumentasikan melalui banyak upaya mendorong pendekatan kebijakan berbasis bukti di Afrika Selatan mengerucut pada hambatan kapasitas di tingkat individu, organisasi, sistem, dan lembaga. Implementasi pendekatan kebijakan berbasis bukti dalam lingkungan birokrasi dengan pegawai negeri sipil yang memperlihatkan "perilaku pencarian bukti" yang rendah memiliki potensi konsekuensi negatif. Saat pegawai publik diminta bekerja dengan bukti, hal ini seperti menantang "kebiasaan". Saat ini, bukti – dalam pengertian yang luas – digunakan hanya pada waktu tertentu, saat dan ketika ada kebutuhan untuk penggunaannya. Sementara, pegawai pemerintah yang memang dengan sadar bekerja dengan bukti akan bergantung pada proses, sistem, dan infrastruktur riset yang efektif dan fungsional di organisasinya untuk memastikan kelanggengan praktik bekerja dengan bukti dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk memastikan suplai riset kebijakan dan sintesis bukti menjadi lebih baik, asumsi dasar bahwa peningkatan akses ke lebih banyak bukti akan menciptakan kebijakan yang lebih baik perlu diperhatikan. Semakin banyak bukti, maka dibutuhkan kapasitas administratif dan prosedural yang semakin tinggi untuk bisa mengendalikan volume data dan informasi. Namun, tanpa suplai memadai riset kebijakan maupun pelibatan bukti – melalui penilaian kritis, analisis, sintesis, dan interpretasi bukti – promosi agenda bukti menjadi kurang bernilai.

Kegiatan baru-baru ini di DPME berkontribusi memberikan pemahaman tangan pertama

mengenai tuntutan. Seperti telah disebutkan, studi tahun 2010/2011 mengenai sikap manajer senior terhadap bukti memberikan pengetahuan penting mengenai pemahaman mereka. Temuan studi digunakan untuk merancang inisiatif tentang membangun permintaan terhadap bukti di kalangan manajer senior. Inisiatif diujicobakan pada 2013 dan 2014 dalam bentuk kursus eksekutif tiga hari bertema kebijakan berbasis bukti, dan ditujukan untuk pembuat kebijakan senior (Dirjen dan Deputi Dirjen). Tujuannya adalah membantu mereka bekerja dengan bukti dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bukti. Permintaan meningkat dan dua kursus lagi diselenggarakan pada 2015. Isi kursus relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan dan manajer senior, dan karena itu dikaji secara teratur, terutama mengingat bukti-bukti baru terus bermunculan.

Membangun pendekatan sistem untuk mendukung penciptaan bukti dan penggunaannya di sektor publik telah dirintis. Hal ini mencakup menemukan dan membuka akses kepada berbagai data ilmiah, data administrasi, dan literatur abu-abu sebagai bahan rujukan pelaporan dan pengambilan keputusan. Pemerintah Afrika Selatan telah membangun kemitraan dengan dua konsorsium yang didanai Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) untuk memengaruhi penggunaan riset dalam kebijakan. Kemitraan ini adalah bagian dari proyek internasional pengembangan kapasitas, Building Capacity to Use Research Evidence (BCURE). Satu proyek berfokus pada pengembangan kapasitas melalui bimbingan dan pelatihan untuk memajukan dan memfasilitasi penggunaan bukti di pemerintah. Sementara, proyek lain berfokus membuat perangkat dan menyatukan praktik terkait bukti di tingkat organisasi. Kedua proyek ini berada di bawah koordinasi DPME untuk memastikan kesesuaiannya dengan konteks Afrika Selatan, dan sudah mulai memberikan kontribusi dalam pemahaman dan respons terhadap permintaan bukti untuk memengaruhi kebijakan dan berbagai praktik.

5 Kesimpulan dan Pesan Kunci

Mempromosikan kebijakan berbasis bukti di Afrika Selatan dan dunia internasional telah menuntun pada banyaknya pertukaran profesional dan pembelajaran mengenai praktik-praktik terbaik. Namun begitu, kegiatan ini masih berupa sebaran kecil, dan tantangan memperdalam pendekatan kebijakan berbasis bukti masih terus ada – terutama di masyarakat yang beragam seperti Afrika Selatan. Peneliti dan kalangan akademisi berkontribusi terhadap penciptaan pengetahuan dalam kebijakan berbasis bukti – meski ini menciptakan pandangan bahwa ilmuwan sosial mencoba melihat proses kebijakan menggunakan lensa akademi. Pejabat publik dan pembuat kebijakan juga belum membuat dokumentasi yang memadai sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam konteks Afrika Selatan dan membantu pemangku kepentingan. Akan tetapi, hal ini perlu dikaji secara teratur agar selalu sejalan dengan konteks yang dinamis.

Kajian tingkat tinggi untuk melihat 20 tahun perjalanan demokrasi Afrika Selatan adalah sesuatu yang unik; negara serupa *(peer)* yang ingin melakukan kajian yang sama, atau yang telah melakukannya, bisa jadi melihat kemiripan dalam proses yang berlangsung. Pengalaman kajian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan memang bekerja dengan bukti – dalam pengertian luas – meskipun dengan derajat intensitas dan tujuan yang berbeda-beda. Fokus ditujukan pada penilaian kritis, interpretasi, analisis, dan sintesis basis bukti melalui diskusi. Peneliti dan pembuat kebijakan sepakat bahwa bukti tidak dapat "bersuara sendiri". Semua faktor yang memengaruhi kebijakan perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan. Hal-hal yang dianggap bukti sah bagi pembuat kebijakan adalah opini publik, kelayakan secara politik, dampak kebijakan, dan pengetahuan tentang konteks lokal. Pemisahan antara pembuat kebijakan dan peneliti perlu dilampaui, dan menjembatani kesenjangan ini bukan hanya tanggung jawab para pialang pengetahuan. Teori penggunaan bukti, yang dipromosikan oleh peneliti ilmu sosial di Afrika Selatan, bisa membantu memahami bukti seperti apa yang akan digunakan dan bagaimana digunakannya dalam kajian kebijakan dan kemajuan nasional, serta dalam perubahan sosial. Pengetahuan yang didapat dari perjalanan di ranah kebijakan melalui proses kajian disajikan di bawah ini. Hal ini menguatkan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam konteks Afrika Selatan.

Faktor selain bukti memengaruhi kajian kebijakan.

Kajian tahun ke-20 menunjukkan bahwa penelitian bukan satu-satunya bentuk bukti, seperti disebutkan sebelumnya, namun

memang mendominasi konteks kebijakan. Pembuatan kebijakan meliputi berbagai faktor yang perlu ditelaah dan pilihan-pilihan yang harus diambil, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penilaian berbagai sumber, ketidaksetaraan ruang, dan analisis kritis berdasarkan pengalaman. Hal ini juga membutuhkan keahlian dan penilaian pejabat publik senior dan pembuat kebijakan untuk menginterpretasikan pertukaran *(trade-off)* apa yang perlu dilakukan demi manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Banyak tantangan dialami dalam implementasi kebijakan progresif pascademokrasi, sebagaimana didokumentasikan oleh proses kajian, namun pilihan-pilihan yang dipertimbangkan kala itu memang penting bagi Afrika Selatan untuk dapat bangkit sebagai masyarakat yang damai dan demokratis.

Tujuan strategis sulit dicapai apabila solusi cepat dan jangka pendek yang dituju untuk mengatasi masalah jangka panjang. Perencanaan dan analisis tren masa depan bergantung pada ketersediaan data longitudinal, spasial, dan panel, yang saat ini masih belum tersedia secara layak di Afrika Selatan. Jika pun ada, tidak diakses dan digunakan dengan efektif. Saat bukti ilmiah tidak dapat diakses dengan mudah, maka bukti juga tidak akan disosialisasikan dengan efektif, dan mereka yang menghasilkan bukti tidak bisa menerjemahkan temuannya agar relevan untuk kebijakan – pada akhirnya, keberhasilan menyatukan "berpikir berorientasi bukti" dalam budaya organisasi menjadi rendah.

Membangun konsensus dan intermediasi antara peneliti dan pembuat kebijakan bergantung pada para pemerjuang bukti.

Restrukturisasi dan pembentukan DPME baru-baru ini melibatkan rekrutmen spesialis di bidang masing-masing. Fungsi mereka adalah memfasilitasi proses penilaian kinerja pemerintah berdasarkan 14 hasil prioritas dan menggunakan mekanisme M&E yang efektif. Berbekal jaringan dan hubungan erat dengan departemen pemerintah lain (nasional dan daerah), juga dengan komunitas riset, akademisi, dan lembaga riset, para fasilitator ini menjadi pemerjuang dalam menavigasi jalur-jalur yang sudah ada maupun baru terkait pengembangan konsensus terhadap narasi melalui analisis dan interpretasi bukti. Mereka bekerja secara strategis untuk menjembatani keterpisahan antara peneliti dan pembuat kebijakan. Dalam beberapa situasi mereka cukup berhasil, namun dalam situasi lain kekeliruan interpretasi dan perbedaan pemahamanlah yang bertahan – tanpa ada cukup waktu untuk menjawab isu-isu tersebut.

Manajer senior layanan publik juga dapat menghasilkan bukti.

Keterlibatan awal ahli bidang dan manajer senior menghasilkan pengetahuan mengenai perkembangan sektor saat ini, menangkap pengetahuan yang ada, dan berkontribusi terhadap literatur lebih jauh sebagai basis bukti. Ahli-ahli ini adalah tenaga internal di departemen – sebagian memiliki latar belakang akademis dan sebagian lain memiliki pengetahuan empiris mengenai kebijakan, terutama terkait kinerja pemerintah. Keterlibatan ini memberikan fokus di mana mereka harus bermula saat hendak menjelajahi bentangan bukti per area strategis. Kerja mereka secara alamiah juga berkembang menjadi dialog dengan departemen pemerintah lainnya, peneliti, dan jaringan ahli eksternal yang memberikan bukti relevan kepada suatu isu kebijakan. Proses ini berkembang menjadi identifikasi kesenjangan basis bukti – dari sini, riset spesifik bisa ditugaskan dan demikian memastikan relevansi dan penggunaannya.

Diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan terkait sedini mungkin untuk membangun narasi.

Strategi penting untuk membangun narasi adalah mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses kajian sebelum produk akhir dibuat. Sejak awal, peneliti, lembaga riset, dan akademisi diundang untuk memaparkan

temuan mereka dan mengkaji kebijakan menggunakan platform yang sama dengan pejabat senior dan badan pemerintah. Perbedaan tak dapat dihindari saat sudut pandang, pengalaman, dan interpretasi berbeda terhadap temuan disajikan. Dalam beberapa kasus, kelemahan kinerja pemerintah yang diidentifikasi oleh analisis data bisa dijelaskan oleh pembuat keputusan menggunakan interpretasi terhadap bukti kolektif. Pengelompokan dan penyusunan pesan-pesan kunci dari berbagai temuan menjadi dasar narasi.

Dari pihak politisi, pesan mereka jelas: Afrika Selatan memiliki kisah yang baik untuk disajikan, meskipun mengalami banyak tantangan. Jika bukti mengarah mengatakan sebaliknya, diskusi dibuka untuk interpretasi dan analisis lebih jauh. Tantangan yang masih ada terkait kinerja pemerintah didokumentasikan sebagai bagian narasi melalui refleksi jujur dan apa adanya. Secara bersamaan, proses kajian terpisah dan independepen juga berjalan dan dilakukan terhadap arahan kebijakan tertentu sehingga berguna memperkaya basis bukti mengenai arah pembangunan Afrika Selatan (Cameron, 2013; Coleman, 2013; Sita et al., 2013). Proses yang berbasis bukti, diperkuat oleh dialog dan diskusi, terbukti menjadi proses yang konstruktif.

Dengan berjalannya proses kajian, semakin banyak interaksi internal dan eksternal maupun diskusi yang muncul, dan membentuk suatu refleksi nasional serta dialog mengenai seberapa jauh yang telah dicapai rakyat Afrika Selatan sejak 1994. Didukung kampanye media “20 Tahun Demokrasi”, proses kajian bergulir menjadi kampanye nasional dan menggerakkan setiap penduduk Afrika Selatan untuk merenungkan kontribusinya masing-masing terhadap demokrasi di negaranya. Inti sari dari proses ini adalah:

1. Pemahaman yang luas terhadap bukti, termasuk ideologi, nilai demokrasi, dan pandangan penduduk, akan membantu membangun konsensus dan kredibilitas basis bukti.
2. Untuk menjawab pertanyaan pembangunan kunci, diperlukan jaringan dan hubungan yang dibangun dan dikelola secara aktif melalui fasilitasi dan kegiatan-kegiatan teratur untuk melibatkan bukti – dengan demikian sekaligus memastikan transparansi dan inklusi.
3. Menyatukan “berpikir berorientasi bukti” dan “perilaku pencarian bukti” di tingkat organisasi membutuhkan kapasitas administrasi, sistem manajemen pengetahuan yang berfungsi di sektor publik, tuntutan terhadap bukti bermutu tinggi, dan suplai yang konsisten dari riset kebijakan yang relevan.
4. Temuan riset tidak memberikan jawaban dan bukti sendiri tidak memberikan arah solusi. Untuk itu, dibutuhkan interpretasi dan sintesis berdasarkan berbagai bukti, serta analisis yang efektif.
5. Penguatan dan pembentukan layanan publik yang profesional melalui bukti relevan, interpretasi bukti, dan penggunaan bukti akan memajukan pembuatan kebijakan berbasis bukti menjadi sesuatu yang strategis dan bernilai, lebih dari kegunaannya sebagai perangkat.
6. Pembuatan kebijakan berbasis bukti berpotensi memunculkan “kemauan administrasi” untuk memberdayakan pejabat publik di semua tingkatan dengan pengetahuan mengenai proses kebijakan publik dan perubahan sosial melalui analisis efektif. Dengan demikian, memfasilitasi pemerintah sebagai penyumbang ekonomi pengetahuan.

Daftar Pustaka

Academy of Science of South Africa (ASSAF). 2006. "Evidence-based Practice: 'Double Symposium' Proceedings on Problems, Possibilities and Politics." Tshwane/Pretoria: ASSAF. http://www.assaf.org.za/files/reports/evidence_based/evidence_based_practice.pdf.

Alessandro, Martin, Mariano Lafuente, and Carlos Santiso. 2013. "The Role of the Center of Government – A Literature Review." Inter-American Development Bank. Technical Note no: IDB-TN-581. September 2013.

Bullen, Alison. 2015. "Linking Research to Policy and Practice: Assessing the Strength of Evidence." DRUSSA. Diakses 15 Mei 2015. http://www.drussa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2646%3Alinking-research-to-policy-and-practice-assessing-the-strength-of-evidence&catid=203%3Adefining-the-field&Itemid=300&lang=en.

Cameron, Edwin. 2013. "20 Years of Our Democracy." Makalah dipaparkan pada Sunday Times Literary Awards, Johannesburg, Afrika Selatan, 29 Juni.

Carden, Fred. 2009. Knowledge to Policy. IDRC, CRDI, Canada: Sage Publications. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/37706/1/IDL-37706.pdf

Coleman, Colin. 2013. "Two Decades of Freedom: What South Africa is Doing With It, and What Now Needs to Be Done." Goldman Sachs: Investment Banking Division.

Davies, Philip, and Gemma Wright. 2009. "Evidence-Based Policy Making to Support Pro-Poor Policy Development." Makalah tidak diterbitkan ditulis untuk PSPPD Kepresidenan Afrika Selatan.

Department of Planning, Monitoring and Evaluation. 2012. "Plan for the 20-Year Review." Kepresidenan Afrika Selatan.

Department of Planning, Monitoring and Evaluation. 2014. "Discussion Document: Performance Monitoring and Evaluation: Principles and Approach." Pretoria: Department of Planning, Monitoring and Evaluation.

Department of Planning, Monitoring and Evaluation. 2015. "Diagnostic of Research in DPME." First draft report, Department of Planning, Monitoring and Evaluation, tidak diterbitkan.

Department of Science and Technology. 2012. "SA National Survey of Research and Experimental Development: Main Analysis Report, 2011/12."

Du Toit, Andries. 2012. "Making Sense of 'Evidence': Notes on the Discursive Politics of Research and Pro-Poor Policy Making." Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies. University of the Western Cape, South Africa. Working Paper 21.

Grobbelaar, Sara. 2014. "Research Uptake: Knowledge to Policy Series – Tensions Between Researchers, Policy Analysts and Politicians." CREST, Stellenbosch University, South Africa. Diakses 3 Mei 2014. http://www.drussa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2408%3Apart-i-research-uptake-knowledge-to-policy-series-tensions-between-researchers-policy-analysts-and-politicians&catid=206%3Aword-of-the-moment&Itemid=299&lang=en.

Landman, J. P. 2013. The Long View – Getting Behind the Drama of South Africa's headlines. Pretoria, SA: Stonebridge Books.

Liverani, Marco, Benjamin Hawkins, and Justin O. Parkhurst. 2013. "Political and Institutional Influences on the Use of Evidence in Public Health Policy. A Systematic Review." PLOS, 8:10. doi 10.1371/journal.pone.0077404.

Mackenzie, Jessica, Arnaldo Pellini, and Widya Sutiyo. 2015. "Establishing Government Think Tanks: An Overview of Comparative Models." Knowledge Sector Initiative, Australian Aid, Working Paper 4. http://www.ksi-indonesia.org/index.php/publications/2015/04/02/50/establishing-government-think-tanks-an-overview-of-comparative-models.html

Newman, Kirsty, Antonio Capillo, Akin Famurewa, Chandrika Nath, and Willie Siyanbola. 2013. "What is the Evidence on Evidence-Informed Policy Making? Lessons from the International Conference on Evidence-Informed Policy Making." International Network for the Availability of Scientific Publications. http://www.inasp.info/uploads/filer_public/2013/04/22/what_is_the_evidence_on_eipm.pdf.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development - The Measurement of Scientific Technological Activities. Frascati Manual. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2002_9789264199040-en.

Oliver, Kathryn, Theo Lorenc, and Simon Innvaer. 2014. "New Directions in Evidence-based Policy Research: a Critical Analysis of the Literature." Health Research Policy and Systems 12:34. doi: 10.1186/1478-4505-12-34.

Oliver, Kathryn, Simon Innvaer, Theo Lorenc, Jenny Woodman, and James Thomas. 2014. "A Systematic Review of Barriers to and Facilitators of the Use of Evidence by Policy Makers." BMC Health Services Research 14:2. doi: 10.1186/1472-6963-14-2.

Oliver, Sandy, Mukdarut Bangpan, Claire Stansfield, and Ruth Stewart. 2015. "Capacity for Conducting Systematic Reviews in Low- and Middle-Income Countries: A Rapid Appraisal." Health Research Policy and Systems 13:23. doi: 10.1186/s12961-015-0012-0.

Phillips, Sean, Ian Goldman, Nolwazi Gasa, Ismail Akhalwaya, and Bernadette Leon. 2014. "A Focus on M&E of Results: An Example from the Presidency, South Africa." Journal of Development Effectiveness 6:4: 392-406. doi: 10.1080/19439342.2014.966453.

Pew-MacArthur Foundation. 2014. "Evidence-Based Policymaking – A Guide for Effective Government." The PEW Charitable Trusts. http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2014/11/evidence-based-policymaking-a-guide-for-effective-government.

Paine Cronin, G. & Sadan, M., 2015, 'Use of evidence in policy making in South Africa: An exploratory study of attitudes of senior government officials', African Evaluation Journal 3(1), Art. #145, 10 halaman.

Sita, Ajen, Koko Khumalo, and Michael Lalor. 2013. "Positioning SA in the Context of the African Story." Ernst & Young.

Sutcliffe, Sophie, and Julius Court. 2005. "Evidence-Based Policy Making. What is it? How does it work? What relevance for developing countries?" London: Overseas Development Institute.

Wesselink, Anna, Hal Colebatch, and Warren Pearce. 2014. "Evidence and Policy: Discourses, Meanings and Practices." Policy Science 47: 339-344. doi 10.1007/s11077-014-9209-2.

Harsha Dayal

Master of Public Health (Wits); BSc Occupational Therapy (Hons) (Wits)

Harsha Dayal saat ini bekerja sebagai direktur penelitian di Departemen Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi dalam Kepresidenan Afrika Selatan. Pengalaman melakukan penelitian di bidang kemiskinan, kesehatan masyarakat, gender, dan studi disabilitas yang ia peroleh selama bekerja di Dewan Penelitian Ilmu Kemanusiaan dari tahun 2007 hingga 2014 telah memberikannya pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjembatani komunitas penelitian dengan pembuat kebijakan menuju prioritas nasional kritis yang berkaitan dengan Ilmu Sosial. Ia memiliki gelar Master di bidang Kesehatan Masyarakat dan merupakan Terapis Okupasi kompeten yang bekerja di sektor kesehatan masyarakat dari tahun 1993 hingga 2007. Selain itu, ia memberikan dukungan kesekretariatan selama pengembangan Asuransi Kesehatan Nasional dan saat ini berada di dalam beberapa kelompok referensi sebagai peneliti dan manajer publik senior. Ia senantiasa berupaya untuk menyatukan dua dunia, yaitu penelitian dan kebijakan, dalam mentransformasi masyarakat dan mengejar tujuan-tujuan pembangunan.

The Knowledge Sector Initiative (KSI) is a joint program between the governments of Indonesia and Australia that seeks to improve the lives of the Indonesian people through better quality public policies that make better use of research, analysis and evidence.
KSI is a consortium led by RTI International and in partnership with Australian National University (ANU), Nossal Institute for Global Health, and Overseas Development Institute (ODI).

RTI INTERNATIONAL

Australian National University

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE | THE NOSSAL INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH

ODI